PEMBANGUNAN POLITIK PENDIDIKAN MENUJU MASYARAKAT BERMARTABAT

M. Sidi Ritaudin

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
penahoo_sidi@yahoo.co.id

Abstrak

Pembangunan politik pendidikan sekarang ini sedang dihadapkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan revolusi komunikasi di era global. Tantangan globalisasi ini dimulai ketika semua bangsa berupaya keras untuk tampil terdepan dalam persaingan melalui reorientasi pemikiran dan rekonstruksi sistem kelembagaan. Tulisan ini mengasumsikan bahwa Islam memiliki potensi untuk tampil sebagai variabel independen dalam memberi makna dan nilai pendidikan yang berkualitas dan beradab. Jika tidak diimbangi dengan penegakan nilai-nilai agama dalam sistem dan kurikulum pendidikan, maka kemajuan ilmu, alih-alih membawa masyarakat bermartabat, malah dapat membawa kehancuran dan kerusakan umat manusia. Sebagai negara pluralis, Indonesia dihadapkan pula pada tuntutan kesatuan dan persatuan dalam keanekaragaman budaya. Untuk itu, upaya yang harus ditempuh adalah memaksimalkan pendidikan multikulturalisme dengan cara memasukkan materi pelajaran multikultural ke dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan.

Kata Kunci: *Politik Pendidikan; Pendidikan Multikultural; Islam; Nilai-nilai Pendidikan*

Abstract

THE DEVELOPMENT OF POLITICS OF EDUCATION TOWARD A DIGNIFIED SOCIETY: The development of politics

of education is currently faced with the development of science and technology in the communication revolution that gave birth to the global era. The globalization challenge begins when all nations strive to perform ahead of the competition through a reorientation of thought and reconstruction of the institutional system. This paper assumes that Islam is potential to be an independent variable in giving meaning and values to reach a qualified and dignified education. If it is not offset by the enforcement of religious values in the education system and curriculum, the progress of science, instead of bringing the community with dignity, can even lead to the destruction of mankind. As a pluralist state, Indonesia is also faced with the demands of unity in cultural diversity. To that end, efforts must be taken to maximize multicultural education by entering a multicultural subject into the curriculum at all levels.

Keywords: *Political Education; Multicultural Education; Islam; Values Education.*

A. Pendahuluan

Bung Karno menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau berubah, bangsa yang tegar menghadapi berbagai tantangan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memilki pradaban yang tinggi, dan memajukan bidang pendidikan. Karena dengan pendidikan ilmu pengetahuan dapat dicapai.[1] Secara filosofis dapat ditegaskan bahwa masyarakat yang maju dan modern adalah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang maju, modern dan merata, baik bentuk kelembagaannya maupun jumlah dan tingkat yang terdidik. Dan pendidikan yang maju dan modern hanya akan ditemukan di dalam masyarakat yang maju dan modern pula.[2]

Landasan konstitusi pendidikan nasional termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama kemerdekaan ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya masyarakat Indonesia yang bermartabat dapat

[1] Betapa perhatian Qur'an terhadap ilmu pengetahuan yang akan menuntun manusia ke peradaban yang tinggi, sehingga kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam al-Qur'an, yang digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objeknya. Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Msaudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1997), h. 442.

[2] Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi Untuk Aksi Dalam Keberagamaan dan Pendidikan* (Yogyakarta : SI Press, 1994, h. 89.

diwujudkan melalui pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan.[3] Bermodalkan iman dan ilmu pengetahuan, maka masyarakat yang maju senantiasa dinamis dan siap melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan dari semua aspek kehidupan menuju kualitas-kualitas yang dicita-citakan. Hal itu tidak mungkin dapat diraih kecuali dengan adanya perubahan pola pikir, dan strategi merubah pola pikir yang stagnan ke dinamis adalah melalui jalur pendidikan. Maka negara-negara yang maju, adalah negara yang memajukan sektor pendidikan. Di sana berdiri universitas-universitas yang *bonafide*, melampaui standar penjaminan mutu yang ditetapkan.

Tantangan pembangunan politik pendidikan yang sudah ada di depan mata, kata M. Amin Abdullah, yaitu tantangan di era globalisasi, adalah menuntut respons tepat dan cepat dari sistem pendidikan Islam secara komprehensif, karena untuk tetap eksis di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, maka perjuangan yang paling dasar mengumpulkan kemampuan untuk tampil dalm persaingan dan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi adalah melakukan reorientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam dan rekonstruksi sistem kelembagaan.[4]

Tantangan sekularisme dalam pendidikan tetap menjadi momok para aktivis pendidikan, karena kumandang suara John Stuart Mill dan Agust Comte yang menyarakan bahwa ideologi pokok ilmu modern adalah positivisme yang pernah ditentang akhir abad ke-19 namun pada dasawarsa ketiga abad ke-20 positivisme mendapat dorongan baru. Gertakan positivisme baru ini dikenal dengan *neo-positivism,* atau *logical positivism,* atau kemudian dikenal juga dengan *logical empirism.*[5] Hal ini memerlukan iradah politik yang kuat dari para pemegang

[3] Yunus M. Firdaus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), h. 129.

[4] Lihat M. Amin Abdullah, "Etika Tauhidik Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik", dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Integrasi Sains-Islam: Mempertemukan Epistemologi Islam dan Sains* (Yogyakarta : Pilar Religia, 2004), h. 8.

[5] Polkinghorne, *Methodology for Human Sciences* (Albany : State University of New York Press, 1983), h. 60.

kebijakan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama beserta jajarannya dan Suara DPR juga tidak kalah pentingnya harus memberikan dukungan terhadap tantangan ini.

Pendidikan sebagai sokoguru masyarakat bermartabat tidak boleh terlepas dari agama, ilmu tidak lepas dari agama, sehingga agama menjadi dependent variable. Oleh karena itu tantangan difokuskan kepada kehendak modernisme yang skularistis. Modern tidak berarti melepaskan agama dari kehidupan ilmiah. Akan tetapi dominasi agama harus diperkuat dalam sistem pendidikan yang bermutu. Terdapat dua macam sekularisasi yang menjadi tantangan berat dalam dunia pendidikan, yaitu sekularisasi objektif dan sekularisasi subjektif yang pada gilirannya menimbulkan sekularisme ideologi kemasyarakatn dan ateisme ilmiah dalam ilmu yang secara agresif mempropagandakan masyarakat sekuler.[6]

B. Pembangunan Politik Pendidikan

Di hampir sebagian besar negara, terlebih lagi negara maju, pendidikan merupakan konsep sosial yang diintroduksi ke dalam pemerintahan agar pemerintah dapat menjadikannya sebagai kebijakan pemerintah. Karena hanya pemerintah yang dianggap sangat representatif di tempatkan di atas kepentingan maupun praktik edukatif dari seluruh lapisan masyarakat. Memang ada lembaga-lembaga swadaya atau swasta yang *concern* terhadap dunia pendidikan, namun kebijakan-kebijakan strategis tetap berada pada pemerintah. Maka harus dibangun sinergisitas antara pemerintah dan swasta dalam memajukan pendidikan di semua segmen kehidupan, terutama untuk memenuhi hajat kemakmuran bangsa, diperlukan komitmen pemerintah sebagai pemegang kendalinya.

Pembangunan politik pendidikan harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi-kondisi sosial-ekonomi,

[6] Paul L. Berger, *The Sacred Canopy : Element of Social Theory of Religion* (Garden City, New York : Doubleday & Company, 1969), h. 127. Bandingkan James L. Peacock and Thomas A. Kirsch, *A Human Direction : An Evolutionary Approach to Social and Culture Anthropology* (New York : Appleton, Croft, 1970).

teknologi, lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok wilayah negara yang dirancang untuk memajukan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga asumsi bahwa masyarakat terdidik masyarakat akan dapat menanggulangi persoalan yang dihadapi, kebutuhan hidup terpenuhi, perbuatan-perbuatan baik akan dilaksnakan. Jadi pembangunan politik pendidikan yang berhasil maka berhasil pula negara mewujudkan masyarakat yang bermartabat. Dalam konteks ini, H.A.R Tilaar menegaskan bahwa peranan pendidikan di anataranya adalah membentuk identitas budaya dan identitas bangsa.[7] Bangsa yang bermartabat merupakan identitas yang menunjukkan bahwa bangsa tersebut memajukan sektor pendidikan dengan baik.

Untuk mencapai tujuan pendidikan maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan modern dalam hal tujuan-tujuan dan metode-metode dasar; prinsip-prinsip mengenai struktur kurikulum dan pokok persoalan yang sesuai dengan perencanaan; dan filsafat dari pendidikan umum dan pendidikan tinggi. Belajar dari fakta empiris bahwa puncak prestasi dari sistem pendidikan Islam pada abad pertengahan di masa kejayaan kebudayaan dan kebangkitan Islam adalah wahana riset dan ijtihad[8] dilakukan secara simultan oleh kalangan ilmuan seraya merekonstruksi sains, filsafat dan teknologi yang sudah ada debgan ideologi dan perspektif sosiologis Islam, yakni sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Islam; menggunakan pendidikan untuk mengajarkan dan menegakkan pola-pola ideal dari kultur Islam sesuai dengan pandangan-pandangan para alim ulama,[9] untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi kultural dengan mengembangkan

[7] H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan : Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 207.

[8] Medhi Nakosteen, *History of Islamic Origin of Western Education, AD 800-1350* (Boulder : Universitas Colorado Press, 1964), h. 41, 52-55, 62, 184, 186, 190-193. Sayyid Husen Nasr, *Science and Civilisation in Islam*, (Cambridge: Harvard University Press, 1968), h. 59-92, 103-106.

[9] George Sarton. *An Introduction to History of Science* (Baltimore: Williams & Wilkins Co., 1927), h. 524, 550, 590. Edward J. Jurji, "The Course of Arab Scientific Thought" dalam N.A. Faris (ed), *The Arab Heritage* (Princeton University Press, 1474), h. 221, 229, 238.

lembaga-lembaga pendidikan Islam; pengintegrasian sains syar'iyyah dengan sains "filosofis" di dalam sistem pendidikan.[10]

Tujuan pendidikan agama, secara substantif, adalah untuk mengangkat harkat dan martabat hidup manusia berdasarkan nilai-nilai agama. Melalui pendidikan agama, manusia kana menjadi kaya pengetahuan religius, kaya nilai dan sikap moral religius, kaya ketrampilan religius. Dengan kekayaan-kekayaan tersebut manusia akan memiliki daya religius, yang dapat mendorong utnuk mengelola dan menerapkan pengetahuan religius, nilai dan sikap moral religius, serta ketrampilan religius dalam praksis hidup, terutama dalam relasinya dengan Tuhan dan sesama manusia serta lingkungan hidupnya.

Strategi pencapaian tujuan tersebut sangat terkait dengan muatan kurikulum, proses pembelajaran, lingkungan sosial, mental keilmuan, strategi pembelajaran dan metode evaluasi. Kesemuanya ini tentu saja memerlukan pedoman, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus, atau kebijakan dan perencanaan pada tingkat lokal dan nasional. Dalam perkembangannya, kajian keagamaan ini, agaknya sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Marshall G.S Hodgson : *First, education was commonly conceived as the teaching of fixed and memorizable statements and formulas which could be adequately learned without any process of thinking as such. Second, that education was…normative in purpose*.[11] Jadi disini tujuan pendidikan menjadi penting guna menentukan strategi pengajaran yang bersifat normatif, sebagaimana diinginkan oleh Allah Swt dalam sistem penciptaan-Nya.

Sebagai khalifah Allah di bumi, manusia berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan bekal ilmu pengetahuan melalu proses pendidikan. Karena misi pendidikan begitu mulia, yaitu merealisasikan nilai-nilai agama, maka pendidikan tidak

[10] Sayyid Husen Nasr, *Science and Civilisation in Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 1968), h. 25, 38-42, 59, lihat juga pada karyanya yang lain, *.An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines* (Cambirdge : Harvard University Press, 1964), h. 3-5, 279-281.

[11] Marshall G.S. Hudgson, T*he Venture of Islam, : Conscience and History in A World Civilization,* vol. II (Cichago : The University of Cichago Press, 1974), h. 438-439.

boleh menjadi urusan yang marginal dan sekedar fungsi klise untuk memelihara nilai dan dan pemikiran yang ketinggalan zaman, tidak memilki peran pembimbingan ke arah masa depan dalam kehidupan masyarakat dan dinamika peradabannya. Di sini politik harus berperan dalam memajukan pendidikan, karena diharapkan pendidikan bisa melakukan transformasi kultur religius, mengembangkannya dan membentuk generasi sesuai dengan yang diinginkan oleh agama. Karena itu hubungan pendidikan dengan politik merupukan hubungan simbiosis mutualistik. Politik yang bermartabat memerlukan pendidikan yang transformatif, dan pendidikan yang maju memerlukan dukungan politikl pemerintah.[12]

C. Nilai-Nilai Pendidikan

Asupan pendidikan agama yang dapat dikenyam mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi merupakan buah kebijakan politik pendidikan, sehingga orang yang pernah duduk di bangku pendidikan formal, sedikit atau banyak, pernah mendapat sentuhan, bimbingan dan pendidikan agama. Kebijakan pelaksanaan pendidikan agama diterapkan oleh pemerintah telah memperlihatkan kemajuan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pembangunan politik pendidikan yang bernuansa agama merupakan suatu keniscayaan karena dasar negara RI adalah Pancasila di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga secara normatif konstitusional rakyat Indonesia tidak ada yang ateis sebab paradoks dengan asas negara.[13]

Mengembangkan nilai-nilai pendidikan dengan *interplay* antara *science* dan religion merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan guna menggali nilai-nilai religius yang

[12] Baca ulasan lebih komprehensif, Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik "Ikhwan" untuk Para Anggota Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya dari Tahun 1928 hingga 1954*, terj. Salafuddin Abu Sayyid dkk (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 62.

[13] Lihat ulasan Faisal Ismail, *Republik Bhinneka Tunggal Ika Mengurai Isi-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 43.

diinterpretasikan dan dikoneksikan ke dalam sistem pendidikan nasional, dengan mensinergikan antara *intellectual authority*, *continuity and change*. Dengan demikian, proses pendidikan memilki kandungan nilai-nilai agama yang dapat menuntun para pemburunya ke dalam ikatan agama menuju kebaikan peradaban bermartabat tinggi.

Dalam konteks ini, Mototako Hiroike sebagaimana kutip Tobroni mengatakan, "*And when we try to improve our lives and strive for better future, supreme morality become the source of creativity and also the highest value criterion of our decision making.*[14] Di sini kata supreme morality bermakna agama yang berperan sebagai sistem nilai yang dituju dalam pendidikan.

Faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi dan politik amat sangat berpengaruh terhadap pemahaman agama yang menjadi variable independen, menentukan terhadap sikap dan prilaku sesorang. Karena masyarakat yang beradab itu adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, berprilaku dan bersikap sesuai dengan tuntunan agama. Maka perhatian pemerintah harus difokuskan pada pembangunan lingkungan, pendidikan, ekonomi dan politik secara simultan dan sinergis. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada skema berikut ini.[15]

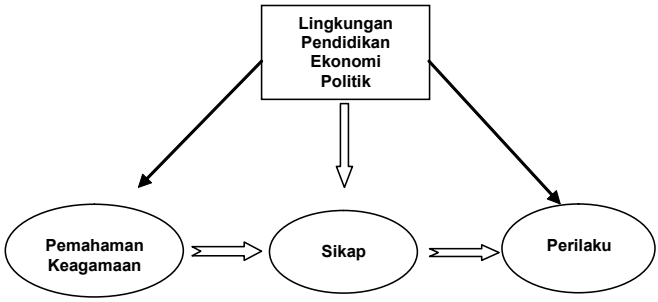

Membaca skema di atas terlihat bahwa tindakan atau perilaku individu, masyarakat atau bangsa dalam suatu negara tergantung bagaimana apresiasinya terhadap berbagai faktor

[14] Tobroni, *Islam Pluralisme Budaya*, h. 119.

[15] Skema ini diadop dari Khamami Zada, "Pemahaman Keagamaan Kelompok Islam Radikal Terhadap Pengembangan Multikulturalisme", dalam *Istiqro' Jurnal Penelitian Islam Indonesia,* Vol. 05, No. 01, 2006), h. 8.

penentu, faktor itu tidak tunggal, melainkan banyak hal, yaitu lingkungan, pendidikan, ekonomi dan politik. Faktor-faktor ini saling berkelindan, saling terkait dan menentukan atau berperan terhadap tindakan seseorang, masyarakat atau bangsa. Di samping itu pula, situasi dan kondisi faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi religiusitas dan sikap. Kemudian, faktor-faktor itu bersinergi dengan pemahaman keagamaan dan sikap yang melahirkan perilaku yang baik yang dapat membawa martabat bangsa ke level yang tinggi.

Sistem pendidikan Islam membawa kecakapan/keahlian teknis ke dalam sebuah hubungan organis dengan sistem etika Islam yang kokoh dalam mendudukkan *scientia* ke bawah syari'ah (nilai-nilai Qur'âni). Sebagian besar para ilmuan etika, khususnya di kalangan muslim, secara *taken for granted,* memandang bahwa etika Islam itu sinonim dengan moral dan akhlak.[16] Sistem pendidikan Islam mempraktekkan ajaran-ajaran al-Qur'an untuk memajukan umat manusia melalui usaha-usaha yang tekun dan ulet, dengan seruan humanisme teknis yang kreatif dan altruistis dengan etos etika dari epistemologi dan sistem pendidikan Islam.

Prinsip pengembangan ilmu yang diapresiasi oleh Islam adalah ilmu yang ditunjang oleh argumentasi, melalui proses tadabbur dan observasi, jadi dengan demikian tidak terjadi stagnasi, melainkan selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi tempat dan waktu. Agaknya inilah yang menyebabkan bahwa Islam itu mutabiqun fi kulli zaman wa makan. Dan ditegaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa ilmu pengetahuan dan pengajaran (*ta'lim*) merupakan hal yang alami di tengah umat manusia.[17] Artinya secara sunnatullah, ilmu dan pengajaran akan selalu berkembang memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hanya saja perlunya intervensi politik untuk menentukan regulasi dan sistem serta kurikulum pencapaian tujuan pengajaran yang baik dan optimal. Karena ilmu pengetahuan hanya ntumbuh dalam peradaban dan kebudayaan yang berkembang pesat.

---

[16] Rachmat Djatnika, *Sistem Etika Islam (Akhlak Mulia)* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 26, 29-30.

[17] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah,* terj. Ahmadie Thoha (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), h. 534.

D. Pembangunan Masyarakat Bermartabat

Masyarakat bermartabat adalah masyarakat yang memilki ketauhidan yang kokoh dan pendidikan yang tinggi, sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah saw. bahwa masyarakat religius akan tercipta jika memilki ilmu pengetahuan. Masyarakat adil makmur akan terwujud, jika masyarakatnya terdidik. Masyarakat sejahtera, juga akan tercapai jika masyarakatnya selalu mengembangkan kualitas hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari strategi politik pendidikan yang konkrit. Artinya kebijakan politik sangat strategis dalam menentukan langkah-langkah pendidikan yang berkualitas yang didukung oleh fasilitas, srana dan prasarana yang kondusif. Misalkan kebijakan politik tentang penggunaan media sosial, seperti twitter, facebook, sms, ataupun media komunikasi lainnya seperti media cetak dan layar kaca televisi, yang kesemuanya itu mengandung nilai-nilai edukasi yang dapat mengangkat harakat dan martabat bangsa.

Tantangan globalisasi yang cenderung pada kehidupan sekuler dan menggerus nilai-nilai pendidikan yang mengangkat derajat kemanusiaan, nampaknya mudah sekali diidentifikasi. Kalau diperhatikan secara seksama, produk-produk televisi yang ditayangkan banyak yang kurang *educated*. Hampir semua program sudah sangat berorientasi pada ekonomi kapital, berorientasi bisnis, baik dalam bentuk fashion, iklan, gossip, musik, ifotaimen dan lain sebagainya, nyaris meminggirkan nilai-nilai etika dan edukasi. Hal ini tentu saja menyulitkan bagi berkembangnya iklim religius di masyarakat. Jadi faktor kehidupan empiris yang hedonistik, liberalistik dan kapitalistik yang bermuara pada kehidupan sekularistik inilah yang menjadi tantangan berat bagi pembangunan politik pendidikan.

Di samping tantangan globalisasi tersebut, pembangunan politik pendidikan dihadapkan kepada persoalan manajerial kependidikan, ada ungkapan yang berkembang "ganti menteri ganti kebijakan" pada akhirnya membebani masyarakat. Di antaranya persoalan kurikulum, dan persoalan Ujian Nasional, yang dinilai kontraproduktif dengan asas demokratis yang fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan di

pelosok desa dengan di ibukota misalnya jauh berbeda, bagaimana assesmen dan evaluasinya harus diseragamkan. Menurut James Banks, bahwa dalam masalah pengukuran terhadap hasil belajar yang sering disebut dengan istilah ujian atau evaluasi, ternyata dalam prakteknya terjadi ketidakserasian antara angka-angka yang diberikan kepada anak didik yang sering sangat subjektif, baik yang diberikan oleh guru maupun pihak sekola, di mana poin (nilai) yang diperoleh yang sangat tinggi sama sekali tidak sepadan dengan kompetensi atau mutu riilnya. Ketika diterjunkan ke masyarakat, ternyata tidak mampu berbuat apa-apa yang setaraf dengan tingkat atau jenjang pendidikannya. Jelasnya tanpa adanya pengukuran yang objektif dapat dipastikan tidak akan pernah terwujud tujuan pendidikan yang sebenarnya.[18]

Jika sistem dan manajemen pendidikan tidak terukur, tidak objektif dalam evaluasinya, maka pembangunan politik pendidikan dapat dinilai gagal. Karena kegagalan di sektor ini maka jauh panggang masyarakat yang bermartabat dapat terwujud. Oleh karena itu, tidak menjaustifikasi, wajarlah jika kejahatan politik, sperti korupsi, transactional politik, jual beli nilai dalam proses pendidikan, budaya nyontek dan lain sebagainya menjadi semakin subur. Terkait dengan kondisi pendidikan yang demikian ini. A. Malik Fadjar (Mantan Mendiknas 2001) mengakui kebenaran penilaian publik bahwa sistem pendidikan di Indonesia memperoleh predikat terburuk di kawasan Asia[19], seraya mengingatkan bahwa pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, termasuk stabilitas dan keamanan, sebab pelaksanan pendidikan membutuhkan rasa aman. Jadi, martabat bangsa Indonesia di bawah negara-negara yang *Human Development Indeks* (HDI) lebih tinggi, bayangkan Indonesia berada di urutan ke-109.

---

[18] Lihat, James A. Banks, *Multicultural Education : Historical Development, Dimension and Practice* (USA : Review of Research in Education, 1993), h. 115.

[19] Terbukti berdasarkan laporan human development report 2002-UNDP nilai *Human Development Indeks* (HDI) 2000, Indonesia mendapat nilai 0,688 (urutan ke 109),di bawah Filipina (urutan ke 77), Thailand (urutan 70), Malysia (urutan 59),Berunai Darussalam (urutan 32) dan Singapura (urutan 25).

1. Masyarakat Religius

Indikator masyarakat bermartabat, pertama adalah masyarakat religius, yakni masyarakat yang diridhai oleh Sang Maha Pencipta, karena masyarakatnya taat menjalankan segala perintah-Nya dan menghindari sekecil apapun yang dilarang-Nya. Suasana masyarakat seperti tergambar dalam "kota santri" di dalamnya ada kedamaian, kerukunan, toleransi, kekeluargaan, dan semua tindakan masyarakatnya disinari etika dan akhlakul karimah. Sungguh sebuah masyarakat yang ideal. Sebagai kota santri, masyarakat terbangun secara dinamis dan diselimuti oleh pernak-pernik pendidikan. Artinya adanya proses pembebasan manusia dari kemiskinan akan pengetahuan doktrinal religius, niali dan sikap moral religius serta ketrampilan hidup religius melalui proses pendidikan agama.[20] Pendidikan dijalankan tanpa diskriminasi, ia bersifat universal dalam bentuk untuk semua golongan. Wanita pun memperoleh pendidikan yang sama dengan pria. Karena wanita merupakan pasangan pria dalam kehidupan intelektual dan sosialnya.[21]

Tercapainya tatanan masyarakat religius—di mana manusia hidup dengan kedamaian di dalam batinnya dan dengan kedamaian di dalam hubungan-hubungannya dengan segala sesuatu di luar dirinya—tergantung kepada apakah individu-individu dan masyarakat mematuhi kehendak Allah sesuai dengan sifat-sifat mereka, kesanggupan-kesanggupan mereka, yang dimanifestasikan di dalam keseluruhan tatanan alamiah, di dalam keseluruhan proses sejarah dan di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para Nabi-Nya.[22] Oleh sebab itu, guna mengapresiasi kehendak Allah tersebut tidak ada jalan lain kecuali melalui proses pembelajaran, baik secara formal maupun non formal yang didukung dengan proses pendidikan yang berkesinambungan .

---

[20] Sumartana dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001).

[21] Bandingkan dengan Harun Nasution yang mengulas pemikiran pendidikan Rifa'ah Badawi Rafi' At-Tahtawi (1801-1873 M), dalam Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya,* Jilid II (Jakarta : UI-Press, 1986), h. 99.

[22] A.J. Arberry, *Revelation and Reason in Islam* (London : George Allen & Unwin Ltd, 1957), h. 12-14

Masyarakat religius yang ideal adalah masyarakat yang memadukan antara sikap perbuatan dengan idealitas keimanan dan keyakinan, yang tentu saja bersifat *al-ghayb*, yang tidak terlihat seperti mengenai adanya Allah beserta sifat-sifat-Nya, kehidupan sesudah mati. Keyakinan bahwa informasi wahyu Allah di dalam al-Qur'an amat sangat mencukupi memberikan pengetahuan yang diperlukan manusia mengenai subjek-subjek metafisik. Aspek-aspek realitas yang tidak terlihat ini tidak dapat ditanggapi oleh persepsi (penginderaan) manusia, tidak dapat dibuktikan atau disangkal oleh observasi-observasi ilmiah maupun oleh pemikiran-pemikiran spekulatif, semuanya hanya diterima berdasarkan keyakinan tanpa pembuktian, sebab postulasi-postulasi agama tersebut adalah demi kebaikan umat manusia. Tujuan beragama yang demikianlah yang dapat menimbulkan suasana masyarakat religius.[23]

Ilmu pengetahuan dan teknologi modern, termasuk di bidang sosial; ekonomi, politik dan pendidikan, tidak boleh dilihat dari perspektif mekanisme fisik material. Kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, yang berkaitan dengan kebutuhan makan, sandang, papan atau kebutuhan berkuasa, tidak terbatas pada dimensi fisik material saja yang seolah hidup dalam sebuah ruang kosong tanpa arti ketika bergelimang dengan dirinya sendiri dan alam sekitar tempat ia hidup dan mati.[24] Melainkan harus dibalut dengan nuansa metafisika, yaitu kehidupan ritual religius, karena Tuhan berada pada puncak piramida realitas keghaiban sebagai Yang Maha Ghaib, sumber dari segala sumber ketenangan dan kedamaian.

Masyarakat religius adalah masyarakat ideal yang dikehendaki oleh Allah Swt., dan untuk mencapainya diperlukan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi pengaruh lingkungan dan paham sekuler yang menyelimuti masyarakat yang hidonistis,

[23] Para filosuf Muslim telah mengembangkan argumentasi yang cukup rasional ilmiah terhadap persoalan tersebut, di antaranya Ibn Hazm (W. 1064), Ibn Rusyd (Averroes W. 1198) diikuti oleh Immanuel Kant (W. 1804). Lihat, Farrukh, *The Arab Genius in Science,* trans. J.B. Hardy (Washington D.C : Amer, Council of Learner Societies, 1954), h. 97-108.

[24] Lihat Alan Ryan, *The Philosophy of The Social Science* (London : The Macmillan Press Ltd, 1977).

memburu harta dengan apapun caranya. Perintah agama diabaikan dan tidak ada lagi kepedulian dengan sesama manusia lainnya. Maka keadaan semacam ini telah tersebar luas di suatu kota atau bangsa. Allah akan segera mengizinkan kehancuran dan keruntuhannya.

Kehidupan religius pada suatu komunitas sangat ditentukan oleh faktor individu-individu. Jika terdapat dalam komunitas itu oknum pejabat atau anak dan famili pejabat yang sudah tidak peduli lagi dengan individu yang lain, tidak lagi memperdulikan nilai-nilai religius di masyarakat, ia asyik maksyuk dengan hidonitas dan kemewahan hidupnya, segala urusan rakyat sudah tidak terkendalikan. Transaksional politik sudah menjadi pemandangan dan korupsi sudah menjadi tabiat pemerintahan. Keadaan semakin kacau, rakyat sudah tidak lagi terurusi, maka komunitas, atau masyarakat, bangsa atau negara yang demikian akan hancur dan dihancurkan oleh Allah swt., sehancur-hancurnya, karena Dia sudah murka kepada hamba-Nya yang tidak memperdulikan amanah selaku khalifah di bumi dan bertugas memakmurkannya.

Dari uraian-uraian di atas, agaknya dapat ditegaskan bahwa religiusitas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya (dalam hal ini Islam). Menurut Komarudin, yang lebih tepat adalah nilai spiritualitas yang lebih menekankan pada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan muka dari bentuk formal keagamaan. Sehingga orang yang menekankan dimensi spiritualitas ini lebih bersikap apresiatif terhadap nilai-nilai luhur dari ajaran-ajaran agama, meskipun bersumber dari agama lain dari yang dianutnya.[25]

2. Masyarakat Adil Makmur

Indikator masyarakat bermartabat kedua, asyarakat adil makmur yaitu masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan yang adil serta menyejahterakan rakyat. Tidak ada ketimpangan sosial, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Lapangan pekerjaan terbuka lebar, kebutuhan pokok tercukupi, harga bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, seperti sandang,

[25] Komarudin Hidayat, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme* (Jakarta : Paramadina, 1998), h. 62.

pangan dan papan murah dan dapat dibeli oleh masyarakat karena memang memilki daya beli. Dalam konteks ini, jika merujuk pada masa klasik Islam, Rasulullah Saw dan para Shahabat telah memberikan keteladan dalam membina masyarakat adil makmur, masyarakat yang egaliter dan partisipatif, terbuka dan demokratis seperti dalam konsep-konsep sosial politik modern.[26] Agaknya keteladanan para pemimpin yang mengelola negara ini yang masih mengalami depisit dan krisis, krisis keteladanan berbuat adil dan hidup sederhana, sedangkan sumber daya alam yang melimpah ruah telah dikaruniakan oleh Allah sebagai nikmat dan karunia-Nya atas ciptaan-Nya. Soal krisis multidimensi adalah soal salah urus negara dan bangsa. Ini tanggung jawab pemerintah.

Pada era keterbukaan seperti sekarang ini, yaitu era globalisasi yang dimaknai sebagai *a historical transformation, extending and acceleration interactions across time and space, with profound implications in terms of changing power relations, as well as for the capacity of a community to determine its own fate.*[27] Di sini terlihat, seharusnya dengan kehadiran era globalisasi ini yang ditandai dengan derasnya arus informasi, masyarakat semakin merasakan kemakmuran yang adil dan merata. Namun demikian, lagi-lagi karena keterbatasan jenjang pendidikan, maka kemakmuranpun berjenjang tidak merata. Pada era globalisasi ini, siapa yang memperoleh pendidikan yang baik dan tinggi maka akan memperoleh kemakmuran yang baik dan tinggi pula.

Kesenjangan sosial yang berimplikasi pada kesenjangan kemakmuran hidup pada era globalisasi ini tidak terlepas dari berkembangnya atau adanya tekanan dari sistem ekonomi kapitalis dunia, yang membuat masyarakat dunia ketiga menjadi terpinggirkan, karena globalisasi merupakan *the expression of concern about the evaluation of the capitalist world system npw that there apparently does not seem to be any viable alternative.*[28] Jadi globalisasi merupakan trend ekonomi internasional dalam

[26] Lihat uraian lebih luas, Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban* (Jakarta : Dian Rakyat dan Paramadina, 2008), h. 113.

[27] James H. Hittleman and Norani Othman (ed), *Capturing Globalization* (New York : Routledge, 2001), h. 1-16..

[28] Johanes Dragsbaek Schmidt and Jacques Hers (ed.), *Globalization and Social Change* (London and New York : Routledge, 2000), h. 1.

komunikasi, budaya dan politik. Jika tidak berhati-hati dan benar-benar anak didik digambleng dengan pendidikan yang ketat dan disiplin yang tinggi, maka bukan tidak mungkin akan terseret arus globalisasi yang menjurus kepada kehidupan jahiliyah modern, seperti ditengarai oleh al-Maududi dan Sayyid Quthb.[29]

Asas bembinaan masyarakat Islam, untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur, adalah iman kepada Allah, di samping perlu diperhatikan juga ciri tertentu yang ditonjolkan dalam bangunan masyarakat. Allah mewajibakan setiap warga masyarakat untuk beriman kepada-Nya. Bagi Allah, imanlah yang menjadi asas pembinaan masyarakat. Tujuannya supaya menjadi pegangan dalam pembinaan masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan serta dapat meningkatkan perasaan, pikiran dan nurani manusia dengan Sang Pencipta, sehingga manusia terjaga dari penyelewengan.[30] Dengan iman yang kokoh berimplikasi kepada sikap dan perbuatan yang baik. Tidak melanggar norma-norma agama, maka denagan demikian akan terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur.

2. Masyarakat Sejahtera

Indikator masyarakat bermartabat ketiga adalah masyarakat sejahtera. Kata sejahtera memang sulit diukur, akan tetapi secara minimal dapat dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang dapat mensyukuri nikmat dan karunia yang telah didapatkannya. Jika diukur dari segi ekonomi, keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah tercukupi kebutuhan minimum keluarganya. Bagi yang masih kurang secara ekonomi, alias tidaqk terpenuhi, katakanlah yang mestinya makan tiga kali sehari, karena keterbatasan hanya mampu dua kali sehari, ini disebut sebagai masyarakat pra sejahtera. Namun yang dimaksud di sini adalah sejahtera lahir dan batin. Kondisi sosial ekonomi

[29]Lihat ulasan yang dikemukakan oleh kedua tokoh ini dalam Sayyid Quṭb, *Al-'Adālah Al-Ijtimā'iyyah fī al-Islām,* cet ke-7 (Beirut, Kairo : Dar asy-Syuruq, 1987); *Al-Islām wa Musykilāt al-Ḥaḍârah* (Beirut : Dâr al-Syurûq, 1992); Abu A'la Al-Maudûdi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung : Mizan, 1984).

[30] Yusuf Abdul Hadi Asy-Syal, *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur,* terj. Anshori Umar Sitanggal (Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), h. 29.

yang masih tertbelakang tidak menjadi soal akan tetapi tidak secara kasat mata nampak, para pejabat di sisi lain, pamer kemewahan, hidup galmor dan bergelimang harta, hal yang demikian inilah yang membuat batin masyarakat kecil tersiksa, karena tidak ada iradah dan kepedulian politik para pejabat/pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya.

Menurut laporan pembangunan manusia (human development report 2002-UNDP) nilai *Human Development Indeks* (HDI) 2000, Indonesia mendapat nilai 0,688 (urutan ke 109), sekedar perbandingan dapat disebutkan disini, Cina memperoleh nilai 0,762 (urutan ke 96), Filipina 0,754 (urutan ke 77), Thailand 0,752 (urutan 70), Malaysia, 0,782 (urutan 59), Brunai Darussalam 0,856 (urutan 32), Singapura 0,885 (urutan 25), Jepang 0,933 (urutan 9). HDI adalah indeks campuran yang merupakan ukuran rata-rata prestasi penting atas tida dimensi dasar dalam pengembangan atau pembangunan manusia : (a) *long and healthy life;* (b) pengetahuan (*knoledge*); (c) kelayakan standar hidup (*a decent standard of living*).[31]Jika diperhatikan secara seksama hasil HDI tersebut terlihat bahwa tingkat kesejahteraan Indonesia, baik diukur dari standar hidup, pengetahuan/pendiudikan maupun kesehatan, masih jauh dari kelayakan alias tertinggal.

Implikasi sosial yang sangat memprihatinkan dari *a decent standard of living* tersebut adalah munculnya konflik horizontal yang disebabkan oleh kecemburuan-kecemburuan ekonomi. Sebut saja misalnya, kejadian yang nampak bernuansa SARA seperti Peristiwa Sampit beberapa waktu yang lalu, setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memilki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di Tanah Air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi.[32] Kecemburuan ini tentu saja, barangkali, disebabkan karena kurangnya cakrawala pengetahuan dalam rangka membentuk nilai, sikap dan perilaku manusia, yang harus diperluas

[31] Lihat Amin Abdullah, "Etika Tauhidik", h. 22.

[32] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 20.

dan diperdalam melalui proses pendidikan.[33] Pada umumnya, masyarakat pra sejahtera secara ekonomi adalah masyarakat yang minim pendidikan, sedangkan yang pra sejahtera secara ruhani dan spiritualiats juga kurang aspiratif terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

E. Penutup

Tantangan pembangunan politik pendidikan dalam menuju masyarakat bermartabat agaknya harus dihadapi secara serius, sebab jika tidak direspon dengan baik dan menwarkan solusi dan strategi pendidikan melalui kebijakan politik pemerintah, maka cita-cita politik untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, tanpa kemajuan pendidian adalah *nonsense.* Perubahan sosial yang terjadi meniscayakan adanya sistem, sumber daya manusia dan manajemen serta pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagai bangsa bermartabat, maka pembangunan politik pendidikan harus dioptimalkan.

Pembangunan politik pendidikan merupakan strategi pendidikan yang mengoptimalkan peran politik pemerintah yang berkomitmen mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu iangin mencerdaskan bangsa melalui sektor pendidikan untuk meraih ilmu pengetahuan dan pengajaran yang baik, bermutu dan maju. Strategi ini sangat memungkinkan untuk dimaksimalkan ketika otonomi daerah sudah diluncurkan, maka masing-masing kepala daerah berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan bantuan fasilitas, sarana dan prasarana serta bantuan biaya bagi peserta didik, sperti bantuan buku-buku paket, bantuan dana tunjangan pendidikan atau beasiswa dan lain sebagainya.

Indikator-indikator pendidikan yang berhasil membawa peradaban bangsa yang bermartabat adalah masyarakatnya religius, adil makmur, kesejahteraannya meningkat dan dirasakan

[33] Jujun S. Suryasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini* (Jakarta: PT Gramedia, 1986), h. 45.

oleh seluruh lapisan masyarakat. Denyut keadilan sosial dapat diperoleh masyarakat karena adanya keteladanan para pemimpin. Kesalehan sosial para pejabat ditunjukkan dengan pola hidup yang sederhana. Keberpihakan dan campurtangan pemerintah dalam menangani permaslahan pendidikan, serta membuat kebijakan-kebijakan politik yang kongkrit dalam memajukan sektor pendidikan ini. Karena bangsa yang bermartabat dapat dicapai melalui ilmu pengetahuan dan pengajaran melalui pendidikan yang baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Arberry, A.J. *Revelation and Reason in Islam*. London : George Allen & Unwin Ltd, 1957.

Asy-Syal, Yusuf Abdul Hadi. *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur. terj. Anshori Umar Sitanggal*. Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987.

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2000.

Banks, James A. *Multicultural Education: Historical Development, Dimension and Practice*. USA: Review of Research in Education, 1993.

Berger, Paul L. *The Sacred Canopy : Element of Social Theory of Religion. Garden City*. New York =: Doubleday & Company, 1969

Farrukh. *The Arab Genius in Science*, trans. J.B. Hardy. Washington D.C : Amer, Council of Learner Societies, 1954.

Firdaus, Yunus M. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005.

Hidayat, Komarudin. *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1998.

Hittleman, James H. and Norani Othman (ed). *Capturing Globalization*. New York : Routledge, 2001.

Hudgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience and History in A World Civilization, vol. II*. Cichago : The University of Cichago Press, 1974.

Ismail, Faisal. *Republik Bhinneka Tunggal Ika Mengurai Isi-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Jurji, Edward J. "The Course of Arab Scientific Thought". N.A. Faris (ed). *The Arab Heritage*, (Princeton University Press, 1474), h. 221, 229, 238.

Lafferty, P. and J. Rowe. *Science, the Hutchinson Dictionary of Science*. Oxford : Helicon, 1993.

M. Amin Abdullah, dkk, *Integrasi Sains-Islam: Mempertemukan Epistemologi Islam dan Sains*. Yogyakarta : Pilar Religia, 2004.

Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin & Peradaban*. Jakarta : Dian Rakyat dan Paramadina, 2008.

Morris, C. *Science, Dictionary of Science and Technology*. San Diego : California : t.tp. 1926.

Nakosteen, Medhi. *History of Islamic Origin of Western Education, AD 800-1350*. Boulder : Universitas Colorado Press, 1964.

Nasr, Sayyid Husen. *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines*. Cambirdge : Harvard University Press, 1964.

Nasr, Sayyid Husen. *Science and Civilisation in Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 1968.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*. Jakarta : UI-Press, 1986.

Peacock, James L. and Thomas A. Kirsch. *A Human Direction: An Evolutionary Approach to Social and Culture Anthropology*. New York : Appleton, Croft, 1970.

Polkinghorne. *Methodology for Human Sciences*. Albany : State University of New York Press, 1983.

Qutb, Sayyid. *Al-'Adālah Al-Ijtimā'iyyah fî al-Islām*, cet ke-7. Beirut/Kairo : Dar asy-Syuruq, 1987.

Qutb, Sayyid. *Al-Islām wa Musykilāt al-Haḍārah*. Beirut/Kairo : Dar asy-Syuruq, 1992.

Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik "Ikhwan" untuk Para Anggota*

Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya dari Tahun 1928 hingga 1954, terj. Salafuddin Abu Sayyid dkk. Solo : Era Intermedia, 2000.

Ryan, Alan. *The Philosophy of The Social Science*. London : The Macmillan Press Ltd, 1977.

Sarton, George. *An Introduction to History of Science*. Baltimore : Williams & Wilkins Co., 1927.

Schmidt, Johanes Dragsbaek and Jacques Hers (ed.). *Globalization and Social Change*. London and New York : Routledge, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Msaudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan, 1997

Sumartana dkk. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Suryasumantri, Jujun S. *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa Ini*. Jakarta : PT Gramedia, 1986.

Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

Tobroni dan Syamsul Arifin. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan*. Yogyakarta : SIPress, 1994.

Zada, Khamami. "Pemahaman Keagamaan Kelompok Islam Radikal Terhadap Pengembangan Multikulturalisme". *Istiqro': Jurnal Penelitian Islam Indonesia*, Vol. 05, No. 01, 2006.